

**MEKANISME, WEWENANG, DAN AKIBAT HUKUM  
PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN  
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA**

**TESIS**

**WIWIK BUDI WASITO  
NPM. 0606006854**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI PASCASARJANA  
KEKHUSUSAN HUKUM TATA NEGARA  
JAKARTA  
JANUARI 2009**

**MEKANISME, WEWENANG, DAN AKIBAT HUKUM  
PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN  
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum**

**WIWIK BUDI WASITO  
NPM. 0606006854**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI PASCASARJANA  
KEKHUSUSAN HUKUM TATA NEGARA  
JAKARTA  
JANUARI 2009**

## **HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

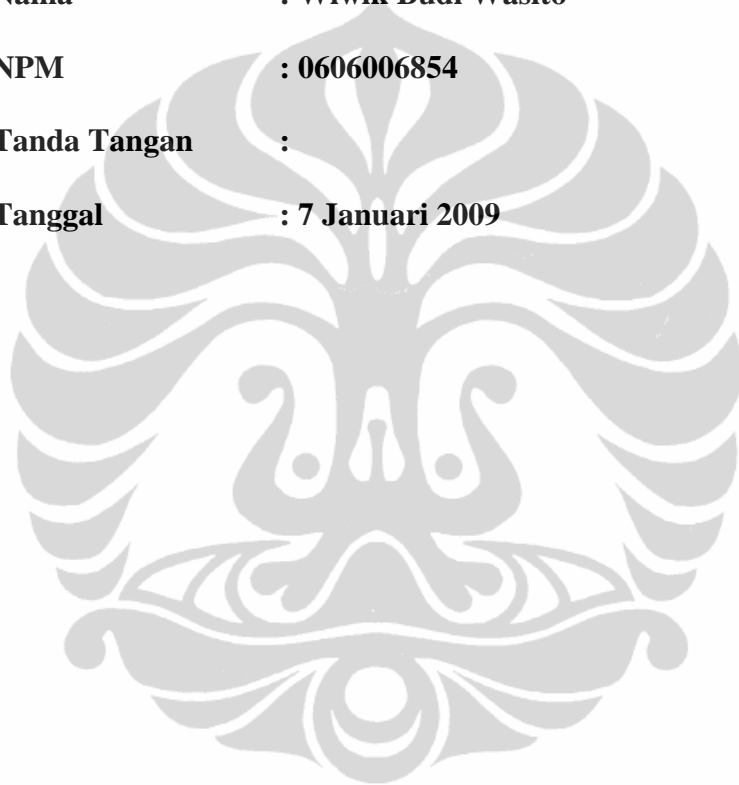
**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Wiwik Budi Wasito**

**NPM : 0606006854**

**Tanda Tangan :**

**Tanggal : 7 Januari 2009**



## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Wiwik Budi Wasito  
NPM : 0606006854  
Program Studi : Pascasarjana Pengkhususan Hukum Tata Negara  
Judul Tesis : Mekanisme, Wewenang, dan Akibat Hukum  
Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden  
dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Pascasarjana Pengkhususan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. ( )

Penguji : Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. ( )

Penguji : Prof. Dr. Ramly Hutabarat, S.H., M.Hum. ( )

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal :

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena, atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum dalam Program Studi Pascasarjana Kekhususan Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Prof. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
- (2) Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang telah membiayai perkuliahan saya;
- (3) Orang tua dan keluarga, terlebih kepada istri saya, Aidatul Fitriyah Wasito, yang telah memberikan segenap bantuan dan dukungan materiil dan moril;
- (4) Sahabat dan sejawat di perkuliahan dan di Mahkamah Konstitusi yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Tata Negara.

Jakarta, 7 Januari 2009

Wiwik Budi Wasito

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wiwik Budi Wasito  
NPM : 0606006854  
Program Studi : Pascasarjana  
Departemen : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Hukum  
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**MEKANISME, WEWENANG, DAN AKIBAT HUKUM PEMBERHENTIAN  
PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM  
KETATANEGARAAN INDONESIA**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada tanggal : 7 Januari 2009  
Yang menyatakan

( Wiwik Budi Wasito )

## ABSTRAK

Nama : Wiwik Budi Wasito  
Program Studi : Pascasarjana Pengkhususan Hukum Tata Negara  
Judul : Mekanisme, Wewenang, dan Akibat Hukum Pemberhentian  
Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan  
Indonesia

Tesis ini membahas tentang pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia atau yang lebih dikenal dengan *impeachment* yang di dalam mekanismenya melibatkan tiga lembaga negara, antara lain, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ketiga lembaga negara ini memiliki wewenang atributif yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) untuk menjalankan proses *impeachment* tersebut.

Sebagai wujud dari pelaksanaan sistem *checks and balances*, dalam melaksanakan proses *impeachment*, ketiga lembaga negara ini memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan sebab Indonesia ialah negara hukum. Pengertian hukum tidak hanya terbatas pada adanya peraturan perundang-undangan saja, namun juga dipatuhinya putusan hakim yang bersifat memaksa dan mengikat.

Dalam kasus *impeachment*, putusan MK yang bersifat final dan mengikat, pada akhirnya harus dipatuhi oleh DPR dan MPR dalam memutus pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dari jabatannya.

Kata kunci:  
mekanisme, wewenang, akibat hukum, *impeachment*

## ABSTRACT

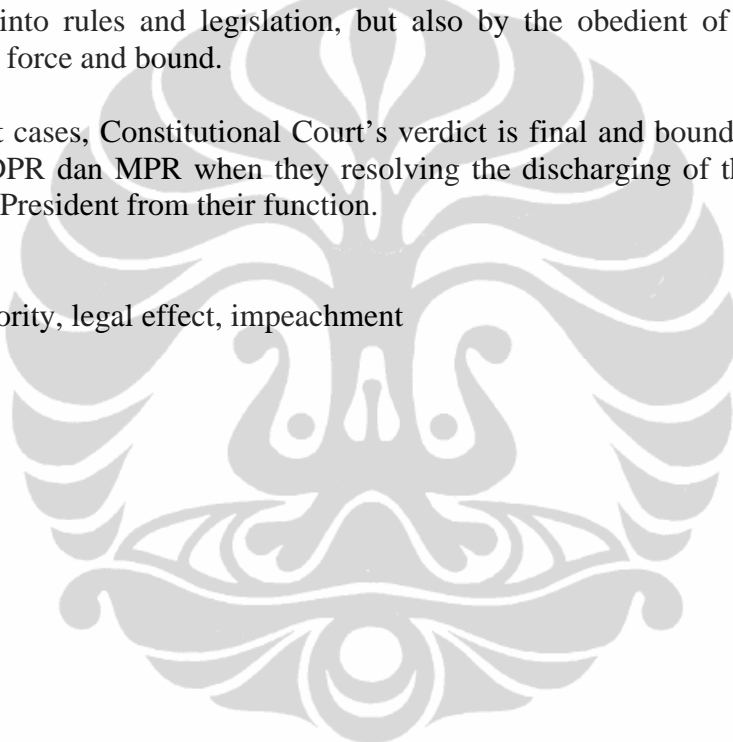
Name : Wiwik Budi Wasito  
Study Programme : Postgraduate in speciality of Constitutional Law  
Title : Mecanism, Authority, and Legal Effect Toward The  
Removal of The President and/or The Vice President in The  
Indonesian Constitutional System

The thesis is about the discharging of the President and/or the Vice President in the Indonesian constitutional system as known as impeachment, which is the mechanism are involving three state organs, among others are, House of Representatives (DPR), Constitutional Court (MK), and People Representative Assembly (MPR). These three state organs have attributive authority, which is stated in the Constitution of the State of the Republic of Indonesia year 1945 (UUD 1945), to role the impeachment's process.

As a concrete implementation of checks and balances system, in order to role impeachment process, these three state organs have obligation to obey the law and the legislations because Indonesia is a state law. The definition of law is not restricted only into rules and legislation, but also by the obedient of the judge's verdict which is force and bound.

In impeachment cases, Constitutional Court's verdict is final and bound, and had to be obeyed by DPR dan MPR when they resolving the discharging of the President and/or the Vice President from their function.

Keywords:  
mecanism, authority, legal effect, impeachment





## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
I.1 Latar Belakang .....	1
I.2 Perumusan Masalah .....	9
I.3 Tujuan Penelitian .....	9
I.4 Manfaat Penelitian .....	10
I.5 Kerangka Teori .....	10
I.6 Metode Penelitian .....	14
I.6.1 Jenis dan Cara Pengumpulan Data .....	15
I.6.2 Analisis Data .....	16
I.7 Sistematika Pembahasan .....	16
<b>II. IMPEACHMENT DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER DAN PRESIDENSIL .....</b>	<b>18</b>
II.1 Tinjauan Umum .....	18
II.1.1 <i>Impeachment</i> dalam Sistem Pemerintahan Parlementer .....	21
II.1.2 <i>Impeachment</i> dalam Sistem Pemerintahan Presidensiil .....	24
II.2 <i>Impeachment</i> di Indonesia .....	29
II.2.1 UUD 1945 Sebelum Perubahan .....	30
II.2.2 Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 .....	30
II.2.3 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 .....	32
II.2.4 Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959 .....	34
<b>III. MEKANISME DAN WEWENANG PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN BERDASARKAN UUD 1945 HASIL PERUBAHAN .....</b>	<b>38</b>
III.1 Reformasi dan <i>Impeachment</i> Presiden Abdurrahman Wahid .....	38
III.1.1 Reformasi .....	39
III.1.2 <i>Impeachment</i> Presiden Abdurrahman Wahid .....	41
III.2 Persoalan Hukum Seputar <i>Impeachment</i> Berdasarkan UUD 1945 .....	45
III.3 Mekanisme dan Wewenang <i>Impeachment</i> Berdasarkan UUD 1945 Hasil Perubahan .....	48
III.3.1 Mekanisme dan Wewenang <i>Impeachment</i> di DPR .....	50
III.3.2 Mekanisme dan Wewenang <i>Impeachment</i> di MK .....	54
III.3.2.1 Kedudukan Pemohon dan Presiden dan/atau Wakil Presiden .....	55
III.3.2.2 Syarat Formil dan Proses Beracara Perkara	

<i>Impeachment</i> di MK .....	55
III.3.3 Mekanisme dan Wewenang <i>Impeachment</i> di MPR .....	57
<b>IV. ANALISIS AKIBAT HUKUM PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN BERDASARKAN UUD 1945 HASIL PERUBAHAN .....</b>	<b>59</b>
IV.1 Makna Final dan Mengikat Putusan MK .....	59
IV.2 Menyoal <i>Ne Bis In Idem</i> .....	73
<b>V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>76</b>
V.1 Kesimpulan .....	76
V.2 Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>

